

“PEMILIHAN JAKSA AGUNG TERLAMBAT, PENEKAKAN HUKUM TERHAMBAT”

Oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI

Jaksa Agung yang baru akan mempunyai tugas berat ke depan.



Masih tingginya persepsi masyarakat mengenai perilaku korup oleh aparat Kejaksaan, apalagi masih terdapat Jaksa-Jaksa yang terjerat praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kejaksaan dinilai sebagai salah satu institusi dengan hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kurang baik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)

Pada tahun 2013 menyebutkan bidang pengawasan telah menjatuhkan sanksi terhadap 168 Jaksa yang melanggar kode etik.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka kriteria Jaksa Agung yang dipilih ialah:

